

## DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193 / PMK.03 / 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/ atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2018, (Online), <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2018>. Diakses 6 Maret 2019 pukul 20.40.

Presiden Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Republik Indonesia. 2009. Undang - Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Ps. 4.

Republik Indonesia. 2009. Undang - Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Ps. 16B.

Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Salemba Empat.

Sukardji, Untung. 2015. *Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi Revisi 2015. Jakarta: Rajawali Press.